

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredit, sebagai salah satu cara memperoleh modal, keberadaan dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu kala. Entah itu kredit dari lembaga perbankan, ataupun kredit (pinjaman) yang diperoleh dari perorangan. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 butir 11, kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sindikasi sendiri adalah salah satu bentuk kredit. Sindikasi sebagai bentuk kredit sebenarnya sudah eksis keberadaannya dalam praktek. Sindikasi ini lahir sebagai konsekuensi dari perkembangan dunia bisnis, yang menuntut perputaran modal yang cepat dengan jumlah modal yang besar. Hanya saja kredit sindikasi ini nampaknya belum begitu terkenal di Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri, hanya kalangan tertentu sajalah yang kerap menggunakan kredit bentuk ini. Perkembangan sindikasi ini tidak bisa lepas dari pengaruh negara-negara maju (di kawasan Asia khususnya, proses edukasi dari pusat keuangan di Hongkong dan Singapura turut menjadi pemacu timbulnya kredit sindikasi di kalangan perbankan

di Indonesia)¹. Di saat negara maju perkembangan perekonomian dan pembangunannya sangat pesat, negara-negara di kawasan Asia (ASEAN khususnya) sedang terseok-seok. Pertanyaan yang kemudian timbul dalam situasi seperti ini adalah : Bagaimana cara mengejar ketertinggalan (utamanya dalam bidang pembangunan) tersebut ?

Kredit sindikasi hadir di Indonesia dalam rangka menjembatani antara keterbatasan jumlah modal dan kemajuan pembangunan. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai kredit sindikasi, haruslah terlebih dahulu dibedakan antara kredit sindikasi dan sindikasi kredit. Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek, sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit².

Secara spesifik, Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara rinci mengenai kredit sindikasi. Kredit Sindikasi ini diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank. Peraturan Bank Indonesia di atas berfungsi sebagai *lex specialis* dari Undang-Undang Perbankan. Di dalamnya, disebutkan bahwa kredit dalam bentuk sindikasi adalah salah satu bentuk

¹ Herlina Suryati Bachtiar, 2000, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

² Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum; sambutan J. Sudradjad Djiwandono*, cetakan pertama, Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 2.

pengecualian terhadap pelarangan dan pembatasan transaksi. Menurut Pasal 9 ayat

(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank diatur:

“Larangan terhadap pemberian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tidak berlaku terhadap :

- a. Kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan berikut :
 - 1) mengikutsertakan Prime Bank sebagai lead bank;
 - 2) diberikan untuk pembiayaan proyek di sektor riil untuk usaha produktif yang berada di wilayah Indonesia; dan
 - 3) kontribusi bank asing sebagai anggota sindikasi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi bank dalam negeri;
- b. kartu kredit;
- c. kredit konsumsi yang digunakan di dalam negeri;
- d. cerukan intra hari rupiah dan valuta asing yang didukung oleh dokumen dokumen yang bersifat *authenticated* yang menunjukkan konfirmasi akan adanya dana masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia;
- e. cerukan dalam rupiah dan valuta asing karena pembebanan biaya administrasi;
- f. pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola aset-aset bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin oleh Prime Bank.”

Kredit-kredit yang membutuhkan biaya besar yang tidak mungkin dibiayai oleh satu bank karena adanya Lending Legal Limit (batas pemberian kredit). Sindikasi dimaksudkan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, dilihat dari resiko bagi *Lender* yang terlibat dalam kredit sindikasi, resiko yang dihadapi lebih kecil karena kreditur terdiri dari banyak pihak, jangka waktu kredit sindikasi juga umumnya panjang (3-15 tahun), serta adanya kemungkinan bank tersebut membiayai beberapa proyek yang lain akhirnya memperkuat kebutuhan akan adanya sindikasi dari beberapa bank di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia di atas rupanya belum berfungsi sepenuhnya sebagai *lex specialis* Undang-Undang Perbankan dan menempatkan dasar pelaksanaan kredit sindikasi, karena yang dimuat dalam peraturan tersebut (beserta penjelasannya) hanyalah kemungkinan mengenai adanya kredit dalam bentuk sindikasi – sebagai bentuk pengecualian –. Artinya, banyak permasalahan yang dapat timbul akibat aturan yang kurang spesifik itu. Aturan tersebut seolah hanya berperan “melahirkan” kredit sindikasi di Indonesia, namun tidak memikirkan bagaimana kredit sindikasi tersebut “bertumbuh”. Keleluasaan para pihak untuk mengatur sendiri jalannya kredit sindikasi sebagai bentuk pelaksanaan asas kebebasan berkontrak justru dapat menjadi bumerang. Bumerang yang dimaksud yakni karena ada kemungkinan ketika hal tersebut (kredit sindikasi) tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundangan, kemungkinan dapat timbul sengketa atau permasalahan hukum yang semestinya dapat dihindari apabila kredit sindikasi tersebut diatur secara rinci dan menyeluruh.

Nilai kreditnya yang besar dan jangka waktu pemberian kredit yang relatif lama menjadikan kredit yang menggunakan sindikasi umumnya adalah kredit yang bersifat produktif, bukan konsumtif. Misalnya, kredit untuk pembiayaan pembangunan hotel, jalan layang, jalur kereta api, jembatan, dsb. Salah satu contoh proyek yang dibiayai dengan sindikasi yaitu proyek pembangunan kereta api Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Salah satu bank yang berperan aktif sebagai

lender dalam kredit sindikasi tersebut adalah bank BCA, dengan nilai kredit sebesar hampir 2,1 trilyun rupiah. Dalam proyek tersebut, BCA berperan memberikan kredit sebesar 25 % dari total pinjaman³.

Potensi permasalahan sebagaimana dimaksud di atas mulai dapat dilihat dari aspek hak dan kewajiban dalam kredit sindikasi. Hak dan kewajiban dari masing-masing kreditur dalam perjanjian sindikasi adalah terpisah. Jumlah yang terutang setiap waktu oleh debitur kepada masing-masing kreditur atau agen adalah hutang yang terpisah, dan berdiri sendiri, masing-masing kreditur dan agen berhak untuk melindungi dan melaksanakan haknya yang timbul dari perjanjian tersebut, dengan kata lain jika suatu Bank telah komitmen untuk ikut dalam sindikasi, masing-masing bank tetap harus menilai kelayakan proyek tersebut sebagaimana halnya penilaian kredit dalam perjanjian bilateral (hanya satu Bank dan satu debitur), dan tidak bisa menggantungkan diri bahwa karena kredit sindikasi maka merupakan tanggung jawab bersama. Artinya, tanggung jawab debitur terhadap kreditur perlu ditinjau lebih lanjut, mengenai sejauh apa, bagaimana bentuk dari tanggung jawab tersebut, dan apakah tanggung jawab yang demikian sudah cukup melindungi kepentingan kreditur.

³ <http://www.bca.co.id/id/about/hubungan-media/2015-apr-20-dukung-peningkatan/kualitas-bandara.jsp> , diakses tanggal 2 Oktober 2015 pukul 1:01 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: Bagaimana bentuk tanggung jawab debitur terhadap kreditur dalam pembiayaan proyek yang sifatnya sindikasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur dalam pembiayaan proyek yang sifatnya sindikasi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum di bidang hukum perbankan tentang pengaturan mengenai kredit sindikasi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi masyarakat luas

Memberitahukan kepada masyarakat luas tentang bentuk kredit sindikasi, karena selama ini pelaku kredit sindikasi hanya kalangan terbatas. Diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan masyarakat mengenai tanggung jawab

debitur terhadap kreditur dalam kredit sindikasi, sehingga kredit sindikasi semakin banyak dilaksanakan guna memajukan pembangunan di Indonesia.

b) Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan mengenai kredit sindikasi, serta melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan sehingga secara yuridis eksistensi kredit sindikasi terjamin sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi.

c) Bagi Penulis

Penulisan ini berguna sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti, bahwa penulisan hukum dengan judul “Tanggung Jawab Debitur terhadap Kreditur dalam Pembiayaan Proyek yang Sifatnya Sindikasi” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian ini mempunyai kekhususan yaitu untuk mengetahui “Tanggung Jawab Debitur terhadap Kreditur dalam Pembiayaan Proyek yang Sifatnya Sindikasi”. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini dapat dibandingkan dari beberapa penelitian yang pernah

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut peneliti memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan dengan penulisan ini, antara lain:

1. SKRIPSI

a. Judul Penelitian:

“Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Hal Kreditur melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi”.

b. Identitas Penulis:

Nama Mahasiswa : Giska Matahari Gegana

NPM : 0706277705

Universitas : Universitas Indonesia

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum apabila kreditur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agreement*) ?
2. Bagaimana pengaturan ganti rugi dalam hal kreditur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi dalam kaitannya dengan prinsip tanggung renteng dalam suatu perjanjian?

d. Hasil Penelitian

1. Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam satu fasilitas sindikasi, diberikan berdasarkan syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Dalam kredit sindikasi hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama. Kemudian sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen (*agent*) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya, maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral (dua pihak), yang sama tetapi mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah. Setelah sindikasi dari kredit yang diinginkan oleh calon nasabah debitor terbentuk dan kesepakatan mengenai syarat-syarat dari pemberian kredit itu antara bank-bank pemberi kredit dan calon penerima kredit telah pula dicapai, maka dituangkanlah kesepakatan itu dalam suatu perjanjian yang disebut “perjanjian kredit sindikasi” atau *syndicated loan agreement*. Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen yang paling penting di antara dokumen-dokumen lain yang menyangkut pemberian kredit sindikasi tersebut. Dalam perjanjian kredit diatur segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pihak pemberi kredit maupun penerima kredit. Juga ditentukan kewenangan dan kewajiban dari *agent bank* yang ditunjuk. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi yang telah disepakati tersebut, maka pihak yang terugikan dapat meminta pembatalan perjanjian oleh hakim,

karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik, maka wanprestasi dari satu pihak, memberikan kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim.

2. Selain dapat meminta pembatalan atas perjanjian tersebut, pihak yang terugikan juga dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, maka sepanjang cukup bukti mengenai kerugian tersebut, tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan oleh hakim. Namun, prinsip tanggung renteng (tanggung-menanggung) tidak dapat diterapkan dalam perjanjian kredit sindikasi, dalam hal kreditur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, karena sekalipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalah suatu totalitas dan bukannya kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namun tanggung jawab dari masing-masing bank peserta dalam sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng. Artinya, bahwa masing-masing bank peserta hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing-masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab di mana suatu bank menjamin bank lainnya.

2. SKRIPSI

a. Judul Penelitian:

“Pembebanan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Akibat Hukumnya jika terjadi Kredit Macet”.

b. Identitas Penulis:

Nama Mahasiswa : Eka Puspasari
NIM : 030710101039
Universitas : Universitas Jember
Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi?
2. Bagaimana proses pembebanan jaminan dalam perjanjian kredit sindikasi?
3. Bagaimana akibat hukum pembebanan jaminan dan cara penyelesaian jika terjadi kredit macet?

d. Hasil Penelitian:

1. Pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban debitur adalah mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian kredit serta haknya adalah mendapatkan fasilitas kredit dari kreditur. Kewajiban kreditur menyediakan dan memenuhi fasilitas kredit yang

dibutuhkan debitur serta haknya adalah pemenuhan kewajiban dari debitur. Agen berkewajiban untuk mengkoordinir dan melakukan monitoring pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi, haknya adalah mendapatkan biaya keagenan.

2. Proses pembebanan jaminan yang berupa hak kebendaan dilakukan dengan tahap pembuatan akta baik akta notaris (*fiducia*, *borgtocht*) dan akta PPAT (Hak Tanggungan). Setelah dibuat akta notarial kemudian dilakukan pendaftaran. *Fiducia* didaftarkan di Kantor Pendaftaran *Fiducia* dan untuk Hak Tanggungan didaftarkan kepada Kantor Pertanahan setempat. Akta tersebut didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas. Setelah didaftarkan, kemudian diterbitkan sertifikat jaminan yang selanjutnya diserahkan kepada kreditur selaku pemegang hak atas jaminan. Proses pembebanan *borgtocht* dibuat dalam akta notaris.
3. Akibat hukum pembebanan jaminan yaitu kreditur memiliki hak eksekutorial atas benda jaminan. Jika di kemudian hari terjadi kredit macet, kreditur dapat langsung melakukan eksekusi terhadap benda jaminan milik debitur. Cara penyelesaian jika terjadi kredit macet terlebih dahulu dilakukan upaya penyelamatan dengan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Jika upaya penyelamatan tidak berhasil, maka diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk bank swasta dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi benda jaminan kepada

Pengadilan Negeri, sedangkan untuk bank pemerintah dilakukan penyelesaian oleh PUPN. Setelah mendapatkan penetapan pelaksanaan lelang, kemudian dilakukan lelang oleh Kantor Lelang Negara. Hasil lelang dibayarkan kepada masing-masing kreditur.

3. SKRIPSI

a. Judul Penelitian:

“Kewenangan Kreditur Sindikasi dalam Hal Permohonan Pernyataan Pailit”.

b. Identitas Penulis:

Nama Mahasiswa : Arissa Anggraini

NPM : 0806341513

Universitas : Universitas Indonesia

Program Studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dari Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Penjelasan Pasal 2 ayat (1) mengenai kewenangan permohonan pailit kredit sindikasi?
2. Bagaimanakah akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap kreditur sindikasi?

d. Hasil Penelitian:

1. Pada kenyataannya pelaksanaan dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yaitu disebutkan bahwa masing-masing kreditur adalah terpisah sebagaimana kreditur pada umumnya pada kenyataannya tidak dilaksanakan dengan seutuhnya bahwa kreditur secara terpisah atau secara sendiri-sendiri dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada debitur apabila debitur pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan tidak membayar utangnya kepada kreditur. Melainkan pada kenyataannya adalah agen bank jika telah disetujui oleh kreditur mayoritas tetap memiliki kewenangan dalam hal melakukan upaya hukum permohonan pernyataan kepailitan terhadap debitur. Berdasarkan perjanjian pemberian kredit sindikasi antara PT AJB Tbk dkk dengan PT GLOBAL JAYA Tbk tidak disebutkan secara jelas siapa yang berwenang dalam hal mengajukan pailit, akan tetapi dalam perjanjian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya agen memiliki kewenangan yang lebih kuat namun tetap diimbangi dengan persetujuan kreditur mayoritas. Hal tersebut diperbolehkan dalam perjanjian karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata setiap kesepakatan berlaku sebagai perjanjian yang membuatnya, dan juga

adanya adegium yaitu "*lex specialis derogat legi generalis*". Hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum.

2. Dalam hal akibat kepailitan bagi kreditur pada dasarnya adalah tergantung dari kedudukan kreditur tersebut apakah preferen, separatis, ataukah konkuren. Namun dalam kredit sindikasi hanya ada satu jenis kreditur, yaitu kreditur konkuren. Jadi dapat disimpulkan adanya asas *paritas creditorium* atau asas kedudukan debitur yang sama berlaku bagi kreditur saja. Serta nantinya pembagian harta pailit menggunakan asas *pari passu pro rata parte* sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Terhadap debitur akibat kepailitannya yaitu pada saat pernyataan pailit beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan, pada saat ia dinyatakan pailit maka segala sesuatu kekayaannya baik aktiva maupun passive terkena oleh kepailitan ini, juga yang telah diperoleh setelah dinyatakan pailit ini tetap termasuk dalam pailisement, selama ia dalam keadaan pailit penghasilan yang diperolehnya semua masuk dalam kepailitan. Dalam hal kepailitan kredit sindikasi sebagai pihak debitur adalah berbentuk Perseroan Terbatas, dengan sendirinya akibat putusan kepailitan dalam kredit sindikasi adalah mengacu pada akibat kepailitan dalam Perseroan Terbatas. Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke

dalam harta pailit “pembekuan” hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 UUK-PKPU yang berbunyi “Seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh Kurator” terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan.

F. Batasan Konsep

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut peneliti sampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 butir 5).
2. Pengertian tanggung jawab hukum yaitu penggantian kerugian berdasarkan kesalahan dari adanya suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).

3. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit.⁴
4. Debitur adalah si berutang, orang atau badan hukum yang mempunyai utang.
5. Kreditur adalah si berpiutang, orang atau badan hukum yang mengutangkan.
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 2).
7. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pengawas kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepskan sebagai

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm. 2.

kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas⁵. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan normatif-yuridis, artinya penelitian hukum ini berfokus pada norma hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data:

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, dan sumber data tersebut antara lain:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 5) Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 7) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

⁵ Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

8) Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan

Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

9) Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005

b. Bahan Hukum Sekunder:

1) Buku-buku Hukum Perbankan

2) Buku-buku tentang Kredit Sindikasi

3) Jurnal

4) Website dari Internet

5) Majalah dan surat kabar

3. Cara Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

2) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak di Yogyakarta.

4. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu sehingga lengkap, selanjutnya disusun secara teratur sehingga sistematis. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu memaparkan secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang ada. Kualitatif yaitu menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena secara sistematis.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang akan digunakan yaitu proses berpikir secara deduktif.

Artinya peneliti dalam menguraikan kesimpulan dengan alur berpikir dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke hal khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

1. Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian, sistematika penulisan hukum.

2. Bab II : Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang berbagai teori dan hasil penelitian yang meliputi tinjauan umum tentang perjanjian; tinjauan umum tentang utang; tinjauan umum tentang kredit; tinjauan umum mengenai kredit sindikasi; lembaga pengawas transaksi keuangan; tanggung jawab debitur terhadap kreditur dalam pembiayaan proyek yang sifatnya sindikasi; dan analisis mengenai jaminan dalam kredit sindikasi.

3. Bab III : Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan yang berupa jawaban dari permasalahan yang telah diajukan, serta Saran dari peneliti setelah melakukan penelitian hukum.